repository.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya fluktuasi ekonomi yang tinggi di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada masa setelah krisis moneter (tahun 2001-2006) yang tidak setinggi pada masa sebelum krisis moneter (tahun 1993-1996) akibat dari ketidakpastian (*uncertainty*) ekonomi pada masa itu, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan (RPJMD) yang lebih baik dan lebih efektif untuk mengembalikan perekonomian seperti pada masa sebelum krisis moneter. Kemudian permasalahan yang muncul adalah apakah penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur telah mempertimbangkan peranan faktor ekonomi khususnya jika ditinjau dari sektor basis daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kebijakan, strategi dan struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur; mengidentifikasi sektor yang menjadi sektor basis di Propinsi Jawa Timur; serta menganalisis kesesuaian antara struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base* (basis ekonomi). Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Timur yang mencakup 38 kota/kabupaten. Penelitian merupakan *desk study* yaitu data telah tersedia pada Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur. Data yang digunakan untuk menentukan sektor basis dalam penelitian ini adalah data PDRB dan jumlah tenaga kerja dari 38 kota/kabupaten yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan tahun 2001-2005. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor basis yang diakomodasi di dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur, khususnya dalam penentuan sektor prioritas di Kawasan Andalan meliputi sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; dan sektor jasa. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor yang berbasis *utility* (sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan) tidak diakomodasi di dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur, karena output dari sektor-sektor tersebut tidak bisa diekspor dan outputnya hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam suatu daerah saja. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa orde perkotaan berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur yang didasarkan pada variabel jumlah penduduk ternyata tidak konsisten dan mengalami bias struktur keterkaitan antar wilayah, karena orde perkotaan menurut RPJMD Propinsi Jawa Timur tidak bisa menjelaskan keterkaitan wilayah (aksesibilitas) dan arus barang antar daerah. Hasil penelitian yang utama adalah bahwa penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur ternyata telah mempertimbangkan peranan faktor ekonomi khususnya sektor basis daerah, karena perbedaan antara hasil identifikasi RPJMD Propinsi Jawa Timur dan hasil analisis *economic base* (khususnya dalam struktur pengembangan wilayah) tidak terlalu menonjol. Hal ini berarti pertimbangan faktor ekonomi dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur lebih besar (dominan) daripada faktor sosial, politik dan kepentingan (*interests*).

Kata Kunci: Faktor ekonomi, RPJMD Propinsi Jawa Timur, sektor basis

UNIVERSITAS BRAWIJAYA